



Biaya Bangun GOR Pancoran Kemahalan

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai penyalahgunaan anggaran di DKI sudah sangat memprihatinkan. Salah satunya, kata dia, *mark-up* (penggelembungan) anggaran dalam pembangunan gelanggang olahraga (GOR) sebesar Rp43 miliar di Pancoran.

Mark-up, kata pria yang sering disapa Ahok itu, diketahui setelah dirinya mencoba memberikan perbandingan anggaran yang harus dikeluarkan dengan memanggil seorang arsitek.

"Saya diberi tahu arsitek itu bahwa Rp35 miliar saja sudah untung besar. Berarti kan ada selisih," kata Ahok dalam diskusi Pilkada Langsung dan Praktik Bandit Anggaran di Aula Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, kemarin.

Ahok lalu minta pendapat arsitek lain yang bergelut dalam kegiatan liga mahasiswa. Ternyata, mantan Bupati Belitung Timur tersebut mendapati anggaran yang lebih kecil dalam membangun GOR.

"Saya tanya ke anak muda yang menangani liga mahasiswa. Saya kasih terus dia hitung. Ternyata dengan standar internasional hanya Rp17 miliar," kata dia.



M/AMDANI

"Rp43 miliar bisa untuk bangun dua GOR standar internasional."

Basuki Tjahaja Purnama
Gubernur DKI

Saat mendengar jauhnya perbandingan anggaran tersebut, Ahok mengaku kaget. "Dibandingkan Rp43 miliar tadi kan kita sudah bisa bikin dua GOR," kata dia.

Diberhentikan

Sementara itu, dua tersangka korupsi pengadaan perangkat *uninterruptible power supply* (UPS) pada APBD 2014, Alex Usman dan Zaenal Soelaiman, berhenti dan diberhentikan dari jabatan mereka.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika mengatakan pemberhentian dua mantan pejabat DKI itu dilakukan agar mereka lebih fokus dalam mengurus permasa-

lahan hukum yang sedang dihadapi.

"Pak Alex Usman sudah mengajukan pengunduran diri dan pensiun dini, sedangkan Pak Zaenal kami berhenti sementara dari jabatannya," kata Agus.

Surat pengajuan pengunduran diri dan pensiun dini Alex telah diterima Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Selatan. BKD DKI pun telah melakukan proses pemilihan pejabat pengganti melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Untuk jabatan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI yang ditinggalkan Zaenal, BKD juga akan menunjuk pelaksana tugas (plt). Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI adalah Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Masyarakat DKI Fatahillah.

Sementara itu, polisi masih memverifikasi hasil pengeledahan di lima lokasi terkait dengan kasus itu. Hasil verifikasi itu nantinya akan menentukan apakah ada keterlibatan anggota DPRD DKI dalam perkara tersebut.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto mengatakan hasil pengeledahan juga akan dikonfirmasi dengan keterangan para saksi termasuk kepada dua tersangka. (Nyu/Put/Gol/J-1)